

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi adalah cabang teori permainan yang mempelajari rancangan kontrak untuk memotivasi agen rasional untuk bertindak atas nama *principal* saat kepentingan agen tersebut bertentangan dengan milik *principal* (Scott, 2015). Menurut Kim, Nofsinger, dan Mohr (2010) pada umumnya terdapat pemisahan antara pemilik perusahaan dengan manajemen yang akan mempengaruhi pertumbuhan dari bisnis suatu perusahaan. Agar bisnis berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka para pemilik perusahaan atau pemegang saham akan mempekerjakan manajer yang menjadi bagian dari suatu manajemen untuk menjalankan bisnis tersebut. Adanya pemisahan kepemilikan antara pemilik perusahaan dengan manajemen yang menjalankan perusahaan ternyata menimbulkan konflik di dalam perusahaan. Konflik ini biasanya muncul karena kedua pihak akan berpikir untuk memenuhi kepentingan masing-masing. Pemegang saham akan fokus pada peningkatan nilai sahamnya sedangkan manajer fokus pada pemenuhan kepentingan pribadi.

Adanya pihak manajemen yang dapat melakukan kecurangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi membuat para pemilik perusahaan atau pemegang saham menjadi tidak percaya dengan setiap tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Dengan timbulnya berbagai masalah maka akan menambah konflik antara pemegang saham

dengan tim manajemen yang membawa dampak buruk terhadap perusahaan. Konflik ini dikenal dengan nama *agency problem* (Kim, Nofsinger, dan Mohr, 2010).

Masalah agensi tidak hanya terjadi antara prinsipal dan manajemen, tetapi juga dapat antara pemegang saham besar (mayoritas) dan pemegang saham minoritas. Jika ada kepemilikan saham minoritas dalam perusahaan, maka akan timbul masalah agensi baru, yaitu adanya konflik antara pemilik saham mayoritas dengan pemilik saham minoritas (Chen *et al.*, 2010).

Masalah agensi juga menyangkut hubungan kontraktual antara anggota-anggota di perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan agensi terjadi ketika satu orang atau lebih *principal* mempekerjakan orang lain *agent* untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan. *Principal* merupakan pemegang saham atau investor, sedangkan *agent* merupakan manajemen yang mengelola perusahaan. Inti dari hubungan keagenan adalah adanya pemisahan fungsi antara kepemilikan di investor dan pengendalian di pihak manajemen.

Kepentingan ini terus meningkat karena pihak *principal* tidak dapat memonitor aktivitas *agent* sehari-hari untuk memastikan bahwa *agent* bekerja sesuai dengan keinginan para pemegang saham. Sebaliknya, *agent* sendiri memiliki lebih banyak informasi penting mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Hal tersebut memicu timbulnya ketidakseimbangan informasi antara *principal* dan *agent*. Kondisi ini dinamakan dengan asimetri informasi. Adanya asimetri informasi tersebut

dapat mendorong agen untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui prinsipal untuk memaksimalkan keuntungan bagi agen. Agen dapat termotivasi untuk melaporkan informasi yang tidak sebenarnya kepada prinsipal, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja agen.

Menurut Gitman (2012) *agency problem* adalah masalah yang timbul akibat tindakan manajer yang lebih mengutamakan pemenuhan tujuan pribadinya bila dibandingkan dengan tujuan perusahaan. Untuk mengatasi atau *me-minimize* masalah agensi tersebut maka dapat dilakukan dengan dua cara, sebagai berikut:

1. *Market Forces*

Market Forces merupakan pemegang saham yang memiliki saham mayoritas, seperti investor institusional yang biasanya berupa perusahaan asuransi jiwa, *mutual fund*, perusahaan dana pensiun. Melalui hak suara mayoritas maka diyakini akan dapat mengatasi masalah agensi. Hal tersebut dilakukan dengan cara memberi tekanan kepada manajer untuk bekerja dengan lebih baik ataupun mengganti manajemen yang dianggap tidak dapat memenuhi kesejahteraan pemegang saham atau pemilik perusahaan. Hal yang lain yang dapat dilakukan adalah mengancam dengan mengatakan perusahaan lain akan melakukan *takeover* yang dapat merestrukturisasi manajemen. Tujuan dari hal tersebut adalah menimbulkan motivasi bagi manajemen agar bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan.

2. *Agency Cost*

Agency Cost merupakan biaya yang akan dikeluarkan untuk mengurangi *agency problem* sekaligus untuk pemenuhan kesejahteraan para pemegang saham. Biaya yang dikeluarkan antara lain, berasal dari biaya insentif yang akan diberikan kepada manajer untuk memaksimalkan harga saham. Selain itu, biaya keagenan juga timbul karena adanya pengawasan tersebut dikenal dengan *corporate governance*.

2.2 Tindakan Pajak Agresif

Pembayaran pajak penghasilan bagi perusahaan merupakan transfer kekayaan dari perusahaan kepada pemerintah maka beban pajak yang dibayarkan tersebut merupakan biaya yang sangat besar bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan akan cenderung melakukan usaha penghindaran dan/atau penghematan pajak sebagai upaya untuk dapat membayar dengan seefisien mungkin. Terkadang pemilik atau pemegang saham menginginkan perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajaknya untuk dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Tindakan ataupun usaha meminimalkan pembayaran pajak ini nantinya dapat menghasilkan pelaporan pajak yang agresif (Lanis dan Richardson, 2011).

Definisi tindakan pajak agresif dalam penelitian ini mengacu pada pengertian pajak agresif yang digunakan oleh Frank *et al.*, (2009); Lanis dan Richardson (2011); Mustika (2017) tindakan pajak agresif yaitu suatu tindakan yang bertujuan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong *tax evasion*. Walaupun tindakan pajak yang diambil tidak menyalahi peraturan yang ada, tetapi semakin perusahaan mengambil langkah penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah dari peraturan yang

ada maka tindakan tersebut dinilai semakin agresif. Sedangkan menurut Brune dan Martin (2019) mendefinisikan tindakan pajak agresif adalah penurunan pembayaran pajak yang dilakukan langsung ke otoritas pajak.

Konverman dan Martin (2019) tindakan pajak agresif adalah kegiatan berisiko yang dapat mengenakan biaya besar pada perusahaan. Sedangkan menurut Multazam dan Rahmawaty (2018) tindakan pajak agresif adalah bagian dari manajemen pajak, dimana upaya untuk meminimalkan beban pajak dilakukan dengan membuat perencanaan pajak. Perencanaan pajak adalah upaya untuk meminimalkan hutang pajak. Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik mematuhi ketentuan perpajakan (*tax avoidance*) atau melanggar peraturan (*tax evasion*).

Berdasarkan uraian di atas tindakan pajak agresif merupakan tujuan tindakan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak dengan cara legal maupun ilegal.

Tindakan pajak agresif menggunakan rumus yang diadopsi dari (Lanis dan Richardson, 2007), yaitu sebagai berikut :

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Pajak Sebelum Penghasilan Pajak}} \times 100\%$$

2.2.1 Keuntungan dan Kerugian dari Tindakan Pajak Agresif

Sebelum memutuskan untuk melakukan suatu tindakan pajak agresif, pembuat keputusan (manajer) akan memperhitungkan keuntungan dan kerugian dari tindakan yang akan dilakukan. Ada tiga keuntungan tindakan pajak agresif :

1. Keuntungan berupa penghematan pajak yang akan dibayarkan perusahaan kepada Negara, sehingga jumlah kas yang dinikmati pemilik/pemegang saham dalam perusahaan menjadi lebih besar.
2. Keuntungan bagi manajer (baik langsung maupun tidak langsung) yang mendapatkan kompensasi dari pemilik/pemegang saham perusahaan atas tindakan pajak agresif yang dilakukannya.
3. Keuntungan bagi manajer adalah mempunyai kesempatan untuk melakukan *rent extraction*.

Sedangkan kerugian dari tindakan pajak agresif diantaranya adalah ;

1. Kemungkinan perusahaan mendapatkan sanksi/penalti dari fiskus pajak. Dan turunnya harga saham perusahaan.
2. Rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak.
3. Penurunan harga saham dikarenakan pemegang saham lainnya mengetahui tindakan pajak agresif yang dijalankan manajer dilakukan dalam rangka *rent extraction*.

2.3 Kepemilikan Keluarga

Kerasilidis, Athanasios (2018) mendefinisikan perusahaan keluarga dimana setidaknya satu anggota keluarga pendiri memiliki saham dalam proporsi yang sama atau lebih besar dari 10% dari total saham. Sedangkan Koverman dan Martin (2019) mendefinisikan kepemilikan keluarga adalah dimana masalah keagenan dapat muncul karena sekelompok pemegang saham pengendali yang mungkin juga terlibat dalam manajemen perusahaan, dapat mengambil alih sebagian kecil pemegang non-keluarga.

Kepemilikan keluarga didefinisikan sebagai persentase kepemilikan saham perusahaan oleh anggota keluarga, dimana

kepentingan keluarga terhadap perusahaan akan semakin besar seiring dengan peningkatan jumlah persentase saham tersebut (Masripah dan Vera, 2016).

Penelitian ini menggunakan definisi keluarga yang digunakan oleh Martinez dan Ramalho (2014), perusahaan dianggap memiliki kepemilikan keluarga apabila keseluruhan individu dan perusahaan yang kepemilikannya tercatat (kepemilikan 5% ke atas yang wajib dicatat). Kepemilikan keluarga yang proporsinya lebih dari 5% akan dikategorikan sebagai perusahaan keluarga dan jika sebaliknya akan dikategorikan sebagai perusahaan non keluarga.

Dalam penelitian ini kepemilikan keluarga diukur menggunakan variabel dummy yaitu nilai 1 jika proporsi kepemilikan keluarga $> 5\%$, dan bernilai 0 jika sebaliknya (Martinez dan Ramalho, 2014).

2.4 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah persentase saham yang dimiliki oleh pemerintah, institusi berbadan hukum, institusi keuangan, institusi luar negeri, dana perwalian, dan institusi lainnya. Investor institusi seperti perusahaan investasi, bank dan perusahaan asuransi (Koh, 2003; Murni dan Eka, 2016). Kepemilikan Institusional merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Dengan adanya kepemilikan oleh investor institusional dapat mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau malah memperburuk kinerja manajemen.

Kepemilikan institusional bukan sebagai individual tetapi mereka merupakan badan hukum. Bentuk hukum terdapat bisa bervariasi antara investor institusi dan mencakup segala sesuatu dari memaksimalkan keuntungan bersama secara langsung melalui kepemilikan bersama saham perusahaan, untuk perseroan terbatas kemitraan dan penggabungan dengan undang-undang khusus (Buddy, 2016).

Ngadiman dan Puspitasari (2014) kepemilikan institusional merupakan pihak yang memonitor perusahaan dengan kepemilikan institusi yang besar (lebih dari 5%) mengidentifikasi kemampuannya untuk memonitor manajemen lebih besar. Institusi dapat berupa yayasan, bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, perusahaan berbentuk perseroan (PT), dan institusi lainnya. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen.

Menurut Mei Yuniati, Kharis, Abrar Oemar (2016) kepemilikan institusional adalah tingkat kepemilikan saham oleh institusi dalam perusahaan, diukur oleh proporsi saham yang dimiliki institusional pada akhir tahun yang dinyatakan dalam persentase.

Berdasarkan uraian di atas kepemilikan institusional merupakan kepemilikan yang dimiliki oleh pemerintah, institusi berbadan hukum, institusi keuangan, institusi luar negeri, dana perwalian, dan institusi lainnya. Investor institusi seperti perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, yayasan dan perusahaan berbentuk perseroan (PT).

Kepemilikan institusional menggunakan rumus yang diadopsi dari (Khurana dan Moser, 2009) yaitu sebagai berikut:

$$\text{KPI} = \frac{\text{Total Saham Saham Institusi Beredar}}{\text{Total Saham Saham Beredar}} \times 100\%$$

2.5 Kepemilikan Manajerial

Menurut Multazam dan Rahmawaty (2018) kepemilikan manajerial adalah situasi dimana peran ganda antara manajer dan pemegang saham ada. Dengan kata lain, seorang manajer perusahaan memiliki saham perusahaan.

Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan. Adanya kepemilikan saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan di dalam perusahaan yang tidak merugikan pemegang saham lainnya (Sonya Majid, 2016).

Menurut Tjeleni (2013) kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham.

Berdasarkan uraian di atas kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh dewan direksi dan komisaris.

Kepemilikan manajerial menggunakan rumus yang diadopsi dari (Salaudeen dan Beatrice, 2018) yaitu sebagai berikut:

$$\text{KPMJ} = \frac{\text{Total Saham Saham Manajemen Beredar}}{\text{Total Saham Saham Beredar}} \times 100\%$$

2.6 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah melakukan penelitian tentang pengaruh kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap tindakan pajak agresif. Hasil dari beberapa peneliti akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini, antara lain adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama dan Tahun Penelitian	Variabel	Hasil
1	<i>Family Firm Heterogeneity and Tax Avoidance: The Role of the Founder.</i> Alexander Brune, Martin Thomsen, and Christoph Watrin, 2019.	X ₁ = Perusahaan keluarga X ₂ = Perusahaan non keluarga Y = Penghindaran pajak	Menunjukkan bahwa perusahaan keluarga lebih agresif pajak daripada perusahaan nonkeluarga.
2	<i>Tax Avoidance in Family Firms: Evidence from Large Private Firms.</i> Jost Kovermann, Martin Wendt, 2019.	X ₁ = Perusahaan keluarga swasta X ₂ = Perusahaan non keluarga Y = Penghindaran Pajak	Menunjukkan lebih signifikan perusahaan keluarga terhadap penghindaran pajak daripada perusahaan nonkeluarga.
3	<i>Tax avoidance in managementowned firms: evidence from Brazil.</i> Otávio Gomes Cabello, Luiz Eduardo Gaio, Christoph Watrin, 2019.	X ₁ = Kepemilikan Manajerial Y = Tax Avoidance	Hasil menunjukkan bahwa berbagai tingkat kepemilikan manajemen terkait dengan berbagai tingkat perilaku penghindaran pajak.

4	<i>The Influence of Size Firm and Ownership Structure Toward Aggressive Tax Avoidance of Manufactur Companies Listed in Indonesia Stock Exchange.</i> Ani Kusbandiyah, Norlia Mat Norwani, 2018.	X ₁ = Ukuran Perusahaan X ₂ = Struktur Kepemilikan Perusahaan Y = Tindakan Pajak Agresif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan kepemilikan keluarga tidak memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak yang agresif.
---	---	--	---

No	Judul, Nama dan Tahun Penelitian	Variabel	Hasil
5	<i>Tax Aggressiveness family and non-family firms in Greece.</i> Athanasios Kerassilidis, 2018.	X ₁ = Perusahaan keluarga swasta X ₂ = Perusahaan non keluarga Y = Tindakan Pajak Agresif	Menunjukkan bahwa perusahaan keluarga lebih agresif pajak daripada perusahaan nonkeluarga.
6	<i>The Effect of Corporate Governance Mechanism on Tax Aggressiveness With Earnings Management as Intervening Variable.</i> Shelly Prahadian Putri, Mohamad Adam, Luk Luk Fuadah, 2018.	X ₁ = Corporate Governance Y = Tindakan Pajak Agresif	Hasil penelitian menemukan bahwa kepemilikan institusional dengan dampak negatif signifikan pada agresivitas pajak.
7	<i>Managerial acquisitiveness and corporate tax avoidance.</i> Ferdinand A. Gul, Mehdi Khedmati, Syed Shams, 2018.	X ₁ = Akuisisi Manajerial Y = Tax Avoidance	Menunjukkan bahwa hubungan antara akuisisi manajerial dan penghindaran pajak lebih kuat ketika manajer yang mementingkan diri sendiri dan termotivasi oportunistik mengumumkan akuisisi.

8	<p><i>Corporate Governance, Tax Avoidance, and Financial Constraints.</i> <i>Onur Bayar, Fariz Huseynov, and Sabuhi Sardarli, 2018.</i></p>	<p>X_1 = Corporate Governance Y = Tindakan Pajak Agresif</p>	<p>Menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan lebih agresif pajak.</p>
---	--	---	--

No	Judul, Nama dan Tahun Penelitian	Variabel	Hasil
9	<p><i>The Influence of Leverage, Executive Incentives, Manajerial Ownership on tax Aggressiveness.</i> <i>Shiddiq Multazam, Rahmawaty, 2018.</i></p>	<p>X_1 = Leverage X_2 = Insentif eksekutif X_3 = Kepemilikan Manajerial Y = Tindakan Pajak Agresif</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Leverage, insentif eksekutif, dan kepemilikan manajerial secara simultan mempengaruhi agresivitas pajak, (2) Leverage tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak, (3) Insentif eksekutif tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak, (4) Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap agresivitas pajak.</p>

10	<i>Equity Ownership Structure And Corporate Tax Aggressiveness: The Nigerian Context.</i> Yinka Mashood Salaudeen, Beatrice Ucha Ejeh, 2018.	X ₁ = Struktur Kepemilikan Perusahaan Y = Tindakan Pajak Agresif	Kepemilikan manajerial signifikan negatif terhadap tindakan pajak agresif.
11	<i>Ownership Structure and Tax Aggressiveness of Chinese Listed Companies.</i> Tingting Ying, Brian Wright, Wei Huang, 2017.	X ₁ = Struktur kepemilikan Y = Agresivitas Pajak Perusahaan	Kepemilikan saham institusional berhubungan negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan.
12	<i>Institutional Ownership and Corporate Tax Avoidance: New Evidence.</i> Moaffar khan, Suraj Srinivasan, 2017.	X ₁ = Kepemilikan Institusional Y = Penghindaran Pajak	Menemukan hubungan positif yang signifikan antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak penghasilan

No	Judul, Nama dan Tahun Penelitian	Variabel	Hasil
13	<i>The Effect of Corporate Governance, Ownership and Tax Aggressiveness on Earnings Management.</i> Nico Alexander , Silvy Christina, 2017.	X ₁ = Kepemilikan Manajerial Y = Tindakan Pajak Agresif	Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.
14	<i>Institutional ownership and corporate tax avoidance: new evidence.</i> Khan, Mozaffar N., Suraj Srinivasan, dan Liang Tan, 2016.	X ₁ =Kepemilikan Institusional Y=Penghindaran Pajak Perusahaan	Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.
15	<i>Legal environment and corporate tax avoidance: evidence from state tax codes.</i> Mark (Shuai) Ma dan Wayne B Thomas, 2016.	X ₁ = Lingkungan hukum Y=Penghindaran Pajak Perusahaan	Kepemilikan Manajerial berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.
16	<i>Managerial ownership and tax planning evidence from stock ownership plants.</i> Kim et al., 2016.	X ₁ =Kepemilikan manajerial Y = Perencanaan pajak	Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance

17	<i>Controlling Shareholder and Tax Avoidance: Family Ownership and Corporate Governance. Masripah, Vera Diyanty, Debby Fitriasari, 2016.</i>	X ₁ = Kepemilikan Keluarga X ₂ = Corporate Governance Y = Penghindaran Pajak	Menunjukkan bahwa ketika keluarga adalah pemegang saham pengendali, efek entrenchment pemegang saham pengendali tidak mempengaruhi penghindaran pajak.
18	<i>The Role of Institutional Ownerships, Board of Independent Commissioner and Leverage: Corporate Tax Avoidance in Indonesia. Yetty Murni, Eka Sudarmaji, Eneng Sugihyanti, 2016.</i>	X ₁ = Kepemilikan Institusional X ₂ = Dewan Komisaris Independen X ₃ = Leverage Y = Penghindaran Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya Kepemilikan Institusional yang memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

No	Judul, Nama dan Tahun Penelitian	Variabel	Hasil
19	<i>The Impact of Institutional Ownership on The Relationship between Tax and Capital Structure. Allah Karam Salehi, Abbas Baharipour, Sajjad Mohammadi, 2016.</i>	X ₁ = Kepemilikan Institusional X ₂ = Struktur Modal Y = Penghindaran Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan struktur modal memiliki dampak positif terhadap penghindaran pajak.
20	<i>The influence of family involvement on tax aggressiveness of family firms. Gregorio Sánchez-Marín, María-José Portillo-Navarro, 2016.</i>	X ₁ = Perusahaan keluarga X ₂ = Perusahaan non keluarga Y = Tindakan Pajak Agresif	Menunjukkan bahwa perusahaan keluarga lebih agresif pajak daripada perusahaan nonkeluarga,

21	<i>The Determinants of Effective Tax Rates: Firms' Characteristics and Corporate Governance.</i> Ana Ribeiro, António Cerqueira, Elísio Brandão, 2015.	X ₁ = Corporate Governance Y = Effective Tax Rate	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih besar dan lebih menguntungkan memiliki ETR yang lebih tinggi.
22	<i>Corporate Governance, Incentives, and Tax Avoidance.</i> Christopher S. Armstrong, 2015.	X ₁ = Corporate Governance Y = Penghindaran Pajak	Menunjukkan hubungan positif antara independensi dewan dan kecanggihan finansial untuk tingkat penghindaran pajak yang rendah.
23	<i>Family firms and tax aggressiveness in brazil.</i> Antonio lapo martinez dan Giliard creton ramalho, 2014.	X ₁ = Perusahaan Keluarga Y = Pajak Agresif	Perusahaan keluarga berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif.
24	<i>Tax aggressiveness in private family firms: An agency perspective.</i> Tensie Steijvers dan Mervi Niskanen, 2014.	X ₁ = Perusahaan keluarga Y = Pajak Agresif	Menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga kurang agresif pajak.
No	Judul, Nama dan Tahun Penelitian	Variabel	Hasil
25	<i>Corporate ownership, governance and tax avoidance: An interactive effects.</i> Hairul Azlan Annuar, Ibrahim Aramide Salihu, Siti Normala Sheikh Obid, 2014.	X ₁ = Struktur kepemilikan perusahaan Y = Penghindaran Pajak	Menunjukkan lebih signifikan Struktur kepemilikan perusahaan terhadap penghindaran pajak daripada perusahaan nonkeluarga
26	<i>Government ownership, corporate governance and tax aggressiveness: evidence from China.</i> K. Hung Chan, Phyllis L. L. Mo, Amy Y. Zhou, 2013.	X ₁ = Corporate governance X ₂ = Kepemilikan Pemeintah X ₃ = kepemilikan Keluarga Y = Tindakan Pajak Agresif	Menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga lebih agresif pajak.

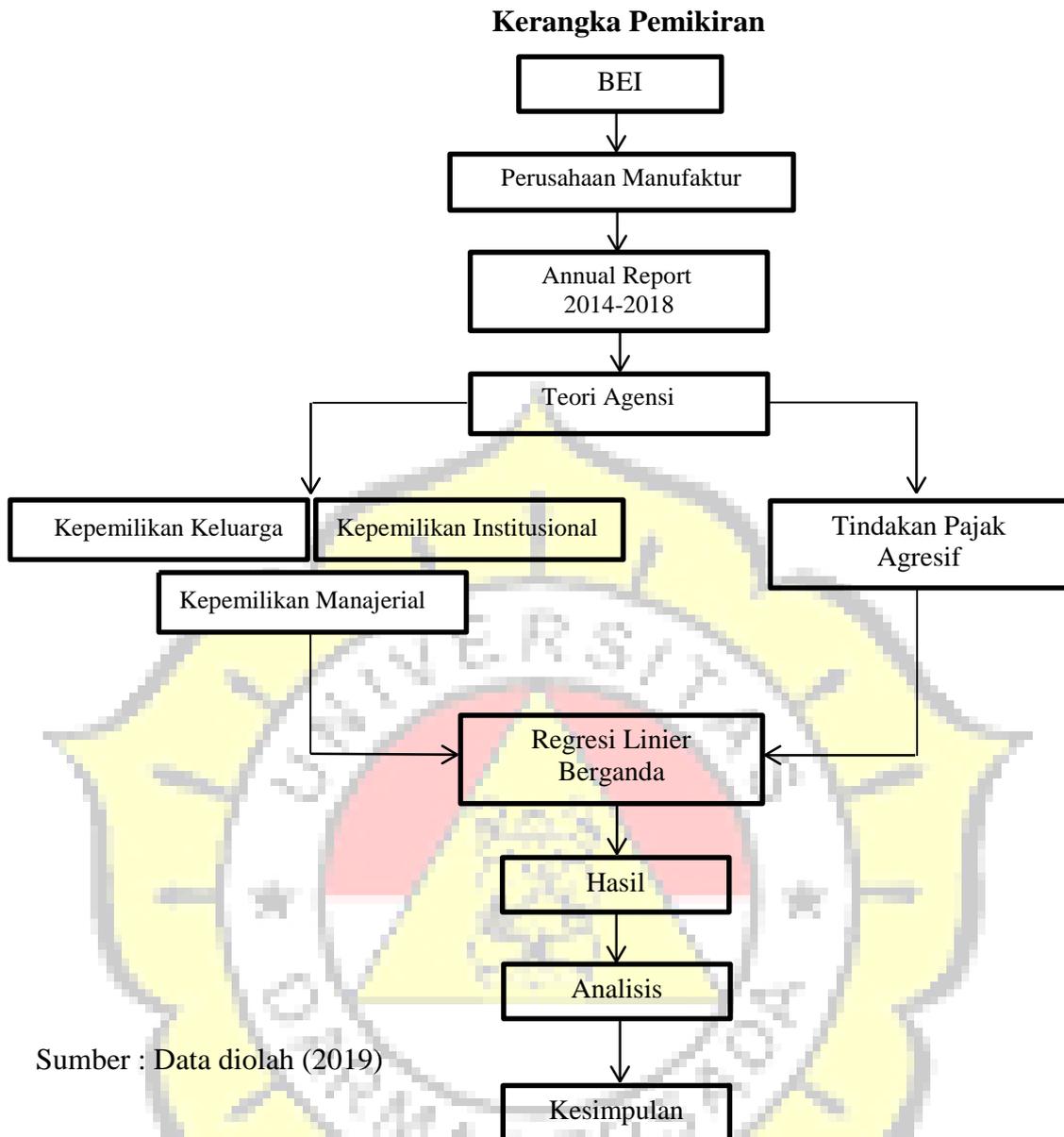
27	<i>Are Family Firms more Tax Aggressive than Nonfamily Firms?</i> <i>Shuping chen, Xia chen, Qiang chen, Terry Shevlin, 2010.</i>	X ₁ = Perusahaan Keluarga X ₂ = Perusahaan Non Keluarga Y = Pajak Agresif	Hubungan antara kepemilikan keluarga dan pajak agresif mempunyai hasil yang tidak signifikan.
28	<i>A Review of Tax Research.</i> <i>Michelle Hanlon dan Shane Heitzman, 2010.</i>	X ₁ = Penelitian Pajak	Hubungan antara perusahaan keluarga dengan tindakan pajak agresif memiliki hubungan yang signifikan.
29	<i>What does tax aggressiveness signal? Evidence from stock price reactions to news about tax shelter involvement.</i> <i>Michelle Hanlon, Joel Slemrod, 2009.</i>	X ₁ = Harga Saham Y = Tindakan Pajak Agresif	Harga saham dan tindakan pajak agresif perusahaan mempunyai hasil yang signifikan secara statistic.
30	<i>Taxation and Corporate Governance: An Economic Approach.</i> <i>Desai dan Dharmapala, 2007.</i>	X ₁ = Sistem Pajak Y = Tata Kelola Perusahaan	Hubungan antara sistem pajak dan tata kelola perusahaan memiliki hasil yang signifikan.

Sumber : Data diolah (2019)

2.7 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan hasil penalaran atas penemuan penelitian sebelumnya serta permasalahan yang telah dikemukakan, maka sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, berikut disajikan kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti berikut :

Gambar 2.1

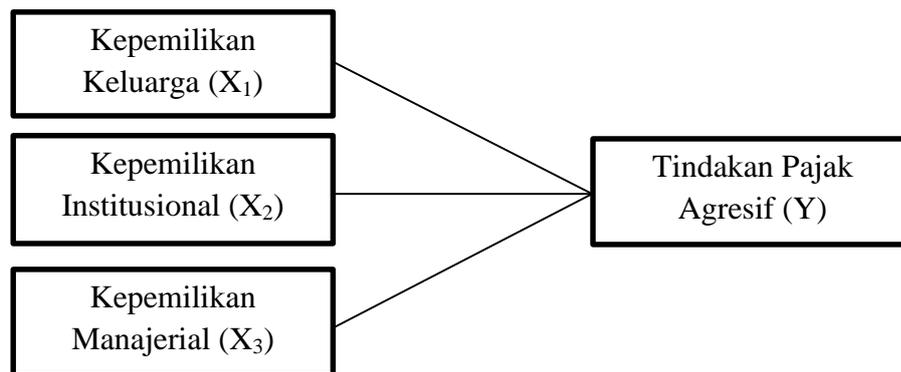


2.8 Model Variabel

Berdasarkan penjelasan diatas, maka variabel dalam penelitian ini adalah :

Gambar 2.2

Model Variabel



Keterangan :

X₁ : Kepemilikan Keluarga

X₂ : Kepemilikan Institusional

X₃ : Kepemilikan Manajerial

Y : *Effective Tax Rate (ETR)*

Sumber : Data diolah (2019)

Model variabel ini untuk menunjukkan arah penyusunan dari metodologi penelitian dan mempermudah dalam pemahaman dan menganalisa masalah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap tindakan pajak agresif.

2.9 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan oleh fakta – fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sekaran dan Bougie, 2017).

2.9.1 Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Tindakan Pajak Agresif

Berdasarkan teori agensi masalah keagenan kepemilikan keluarga terhadap tindakan pajak agresif dalam perusahaan tidak selalu sama tingkatannya. Tingkat keagresifan pajak perusahaan keluarga dengan perusahaan non-keluarga tergantung dari seberapa besar efek manfaat atau biaya yang timbul dari tindakan pajak agresif tersebut terhadap pemilik perusahaan yang berasal dari keluarga pendiri (*family owners*). Penelitian Martinez dan Ramalho (2014); Brune dan Martin (2019); Konvermann dan Martin (2019) menunjukkan kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif. Hal ini terjadi karena adanya pemisahan kepemilikan menimbulkan konflik di dalam perusahaan. Konflik ini biasanya muncul karena kedua pihak akan berpikir untuk memenuhi kepentingan masing-masing. Sedangkan hasil penelitian Steijvers dan Mervi (2014); Chen *et al.*, (2010) menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga kurang agresif pajak daripada kepemilikan non-keluarga.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut maka perumusan hipotesis dari penelitian ini adalah :

H_1 = Kepemilikan Keluarga berpengaruh terhadap Tindakan Pajak Agresif.

2.9.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tindakan Pajak

Agresif

Kepemilikan institusional merupakan pihak yang paling berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional akan menjamin kemakmuran pemegang saham.

Sejalan dengan penelitian Tingting Ying, Brian Wright, Wei Huang, (2017); Putri et al., (2018) kepemilikan institusional berhubungan negatif dengan agresivitas pajak perusahaan. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perusahaan untuk melakukan tindakan pajak agresif. Sedangkan dalam penelitian Khan, Mozaffar N., Suraj Srinivasan, and Liang Tan (2017); Murni *et al.*, (2016) menunjukkan hubungan positif signifikan antara kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak perusahaan.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut maka perumusan hipotesis dari penelitian ini adalah :

H₂ = Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Tindakan Pajak Agresif.

2.9.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Tindakan Pajak Agresif

Berdasarkan teori agensi terdapat pemisahan antara pemilik perusahaan dengan manajemen yang akan mempengaruhi pertumbuhan dari bisnis suatu perusahaan. Adanya pemisahan kepemilikan ternyata menimbulkan konflik di dalam perusahaan. Konflik ini biasanya muncul karena kedua pihak akan berpikir untuk memenuhi kepentingan masing-masing. Penelitian yang dilakukan Mark dan Thomas (2016); Multazam and Rahmawaty (2018); Cabello *et al.*, (2019) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, dengan kata lain semakin tinggi kepemilikan manajerial, semakin tinggi

upaya penghindaran pajak akan dibuat oleh perusahaan. Sedangkan penelitian Kim *et al.*, (2016); Alexander dan Silvy, (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut maka perumusan hipotesis dari penelitian ini adalah :

H₃ = Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Tindakan Pajak Agresif.

